



KAJIAN INDEKS DAYA SAING DESA DAN KELURAHAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

STUDY ON VILLAGE COMPETITIVENESS INDEX IN CENTRAL JAVA

DOI: <http://dx.doi.org/10.31002/rep.v5i2.1919>

Bimo Aji Dimas Danindro^{1✉}, Harmawanti Marhaeny²

¹ Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tidore Kepulauan, ² Badan Pusat Statistik (BPS)

✉ bimo.danindro@bps.go.id

Abstrak

Pembangunan desa memosisikan desa sebagai subjek pembangunan. Daya saing dimaknai sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan pembangunan mutlak harus dimiliki desa untuk mewujudkan kebijakan pembangunan desa. Terbatasnya ukuran daya saing hingga tingkat desa menunjukkan urgensi pembentukan indikator tersebut. Penelitian ini bertujuan membentuk indeks daya saing desa (IDD) serta keterbandingannya terhadap kelurahan. Pembentukan Indeks komposit merujuk pada *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide* yang disusun oleh OECD. Indeks ini mencakup 5 dimensi dan menggunakan data Potensi Desa (PODES) 2014. Penelitian ini menghasilkan IDD yang berkorelasi yang positif dan signifikan dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2014. Desa dan Kelurahan dikelompokkan menjadi 3 yaitu daya saing rendah, sedang dan tinggi. Untuk membantu analisis, penulis menggunakan bantuan peta tematik, *spider chart* dan *box plot*. Dalam Penelitian ini ditemukan temuan bahwa desa dan kelurahan yang berada di wilayah dataran tinggi cenderung terkategori daya saing rendah. Selain itu, desa dan kelurahan dengan daya saing rendah banyak terkonsentrasi di kabupaten seperti Purworejo, Rembang, Wonosobo, Blora, dan Wonogiri. Karakteristik desa memiliki kecenderungan dimensi perekonomian dan kesehatan yang rendah.

Kata kunci: daya saing, indeks, pembangunan desa

Abstract

Village development positions the village as the subject of development. Competitiveness is defined as the ability to achieve the absolute development goals a village must have to realize the village development policy. The limited size of competitiveness to the village level shows the urgency of establishing these indicators. This study aims to establish a village competitiveness index (IDD) and its comparability to kelurahans. Composite index formation refers to the Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide compiled by the OECD. This index covers 5 dimensions and uses 2014 Village Potential data (PODES). This study produces IDD that is positively and significantly correlated with the 2014 Village Development Index (IPD). Villages and Kelurahan are grouped into 3 namely low, medium and high competitiveness. To help the analysis, the authors use the help of thematic maps, spider charts and box plots. In this study, it was found that villages and sub-districts in the highlands tend to be categorized as low competitiveness. In addition, villages and kelurahan with low competitiveness are concentrated in many districts such as Purworejo, Rembang, Wonosobo, Blora, and Wonogiri. Village characteristics have low economic and health dimensions.

Keyword : competitiveness, index, village development

© 2020, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai UU No. 6 Tahun 2014 (SESNEG, 2014), pembangunan wilayah berbasis desa menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Poin penting dari implementasi UU tersebut adalah Desa telah diposisikan sebagai subjek pembangunan.

Posisi sebagai subjek pembangunan menuntut desa harus mampu mengelola jalannya pembangunan di wilayahnya. Untuk mengelola pembangunan di wilayahnya, desa harus memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan pembangunan. Abdullah et. al. (2002) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Dalam hal ini, daya saing daerah dimaknai sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebut merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki desa. Perencanaan kebijakan untuk menciptakan desa yang berdaya saing tentunya membutuhkan identifikasi kondisi dari daya saing desa.

Daya saing nasional merupakan cerminan kondisi daya saing desa secara keseluruhan. Berdasarkan *Global Competitiveness Report* (World Economic Forum, 2015), daya saing Indonesia pada tahun 2015-2016 berada pada ranking 37 dari 140 negara, atau di bawah negara ASEAN lain seperti Singapura(2), Malaysia (18), dan Thailand(32). Hal tersebut menunjukkan bahwa secara global maupun regional, daya saing Indonesia masih harus ditingkatkan jika tidak ingin kalah bersaing dengan negara lain.

Kelurahan sebagai wilayah setingkat desa juga memberikan kontribusi terhadap kondisi daya saing Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya perbedaan kebijakan pemberian dana desa dapat menimbulkan potensi kesenjangan antara desa dan kelurahan. Sehingga perlu diketahui perbandingan karakteristik daya saing desa dan kelurahan.

Upaya peningkatan daya saing desa diimbangi dengan perumusan kebijakan yang efektif dan efisien. Sementara itu, perumusan kebijakan strategis yang efisien dan efektif memerlukan identifikasi dari kondisi yang terjadi di lapangan. Masih minimnya indikator daya saing wilayah di Indonesia terutama yang mengkaji hingga tingkat desa dan kelurahan membuat perumusan kebijakan sulit untuk dilakukan.

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk :

- Membangun indeks komposit yang mengukur daya saing tingkat desa dan kelurahan.
- Memberikan informasi mengenai perbedaan kondisi daya saing antara desa dan kelurahan berdasarkan Indeks Daya Saing Desa dan kelurahan (IDD).
- Melakukan identifikasi karakteristik dari wilayah konsentrasi desa dan kelurahan dengan daya saing rendah.

LANDASAN TEORI

Konsep Daya Saing

World Economic Forum (2015) mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan perekonomian untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Konsep yang diajukan WEF fokus pada perencanaan kebijakan yang tepat, institusi yang sesuai, serta karakteristik ekonomi lain yang mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Untuk wilayah yang lebih kecil, *United Kingdom-Departement of Trade and Industry* (UK-DTI) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka pada persaingan domestik maupun internasional (1998). Sementara itu, Abdullah et. al. (2002) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan perekonomian daerah untuk mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Abdullah et al. menambahkan bahwa walaupun dilihat dari pengadopsian konsep daya saing nasional ke dalam daya saing daerah sudah relevan, namun dalam prakteknya beberapa penyesuaian perlu dilakukan karena kompetisi antar negara tentu tidak mutlak sama dengan kompetisi antar daerah dalam suatu negara.

Pembangunan desa tidak dapat dilepaskan dari daya saing yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Todaro dan Smith (2003) menjelaskan bahwa “jika suatu negara menghendaki pembangunan yang lancar dan berkesinambungan, maka negara tersebut harus memulainya dari perdesaan pada umumnya, dan sektor pertanian pada khususnya”. Pendapat dari kedua ahli tersebut menunjukkan adanya keterkaitan erat antara pembangunan berkelanjutan, perdesaan dan juga daya saing.

Dari penjabaran mengenai keterkaitan daya saing dengan pembangunan di atas, penulis mendekatkan konsep daya saing desa yang digunakan dalam penelitian ini dengan konsep daya saing daerah yang diajukan Abdullah et al. (2002). Namun pendekatan konsep yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pembatasan merujuk cakupan wilayah administrasi yang lebih kecil dengan kewenangan yang lebih

terbatas dibandingkan kabupaten/kota maupun provinsi.

Tinjauan Empiris

BPS dan Bappenas (2015) melakukan kajian terhadap pembangunan desa melalui pembentukan Indeks Pembangunan Desa (IPD) dari lima dimensi yaitu pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintah. Pembentukan indeks ini menggunakan Analisis Komponen Utama (AKU) untuk memperoleh *loading factor* yang dijadikan dasar untuk menghitung bobot setiap indikator. Nilai dari IPD kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu desa mandiri (>75), desa berkembang ($50 < IPD \leq 75$), dan desa tertinggal ($IPD \leq 50$). Klasifikasi pembangunan desa ini yang kemudian dikaitkan dengan sasaran pembangunan desa yang bertujuan untuk: (1) memetakan kondisi desa di Indonesia berdasarkan tingkat perkembangannya; (2) menetapkan target/sasaran pembangunan dalam lima tahun ke depan yang harus dicapai secara bersama-sama oleh para pelaku pembangunan desa; dan (3) memotret kinerja pembangunan yang sudah dilaksanakan di desa.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai indikator daya saing seperti *Global Competitiveness Index* (World Economic Forum, 2015), Indeks Daya Saing Wilayah (BPS, 2012), dan *Regional Competitiveness Indicators* (United Kingdom-Departement of Trade and Industry, 1998). Merujuk pada penelitian terdahulu dan mempertimbangkan ketersediaan data tingkat desa, penulis merumuskan pengukuran daya saing desa dan kelurahan kedalam 5 dimensi sebagai berikut :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Perekonomian

4. Aksesibilitas Fisik dan Informasi
5. Keuangan dan Kelembagaan

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide* (OECD, 2008). OECD (2008) menjabarkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membentuk kerangka kerja teoritis
2. Pemilihan data dan variable yang sesuai
3. Imputasi data yang hilang
4. Analisis Multivariat
5. Normalisasi data
6. Pembobotan dan penggabungan
7. Penghitungan Indikator
8. Pengukuran kekuatan dan kepekaan dari indikator yang dihasilkan
9. Pengecekan ulang data
10. Pengecekan hubungan dengan indikator lain

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji keadaan daya saing di 8.578 desa dan kelurahan berdasarkan hasil Pendataan Potensi Desa tahun 2014 di Jawa Tengah.

Data, Instrumen dan Teknik

Pengumpulan Data

Data yang digunakan dari penelitian ini adalah data sekunder hasil pendataan Potensi Desa (PODES) 2014 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Variabel yang digunakan sebagian besar berkaitan dengan ketersediaan maupun jarak ke fasilitas pendidikan, kesehatan, perekonomian, maupun pemerintahan.

Teknik Analisis Data

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penyusunan indikator komposit yang di ajukan oleh OECD (2008).

Dari indikator komposit berupa indeks yang terbentuk, dapat terlihat

gambaran mengenai daya saing masing-masing desa pada setiap wilayah. Nilai indeks tersebut kemudian dideskripsikan melalui *boxplot*, *spider chart*, dan peta tematik.

Penulis menggunakan kriteria dalam analisis faktor seperti Keiser-Meyer-Olkin /KMO(Sharma, 1996), Uji Bartlett(Tobias & Carson, 1969) dan MSA(Carney & Kaiser, 1977) untuk melihat kelayakan masing-masing indikator penyusun Indeks Daya Saing Desa. Dari 28 indikator awal yang diusulkan, terdapat 27 indikator yang layak menurut kriteria-kriteria di atas. Satu indikator yang tidak memenuhi kriteria yaitu indikator jumlah polindes, sehingga indikator ini dikeluarkan dari pembentukan indeks komposit.

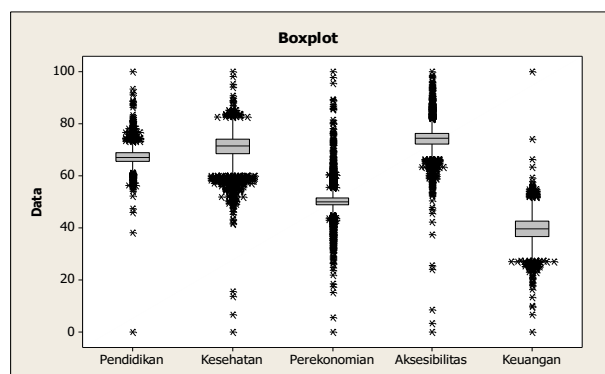
Dalam membantu interpretasi nilai indeks yang dihasilkan, penulis menggunakan pengelompokan indeks dimana nilai kuartil bawah (Q_1) dan kuartil atas (Q_3) menjadi *cut-off point* (Faradis, 2015) (Pusponegoro & Purwanti, 2016). Desa dan kelurahan dengan nilai indeks $< 58,66$ poin tergolong berdaya saing rendah, desa dan kelurahan dengan nilai indeks antara 58,66 dan 62,27 poin tergolong berdaya saing sedang, sementara itu untuk desa dengan nilai indeks $> 62,27$ poin tergolong berdaya saing tinggi.

Indeks komposit yang dihasilkan perlu dilakukan pengujian relevansi dengan indikator sejenis (Booyesen, 2002). Sehingga penulis menguji korelasi Indeks Daya Saing Desa dan Kelurahan (IDD) dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dihitung BPS dan Bappenas (BPS & BAPPENAS, 2015).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara rata-rata, nilai indeks daya saing desa dan kelurahan di Provinsi Jawa Tengah sebesar 61,77 poin. Artinya secara umum daya saing desa dan kelurahan di Jawa Tengah terkategori sedang. Untuk melihat lebih jauh distribusi setiap dimensi penyusun

IDD, penulis menggunakan bantuan *box plot* berikut.

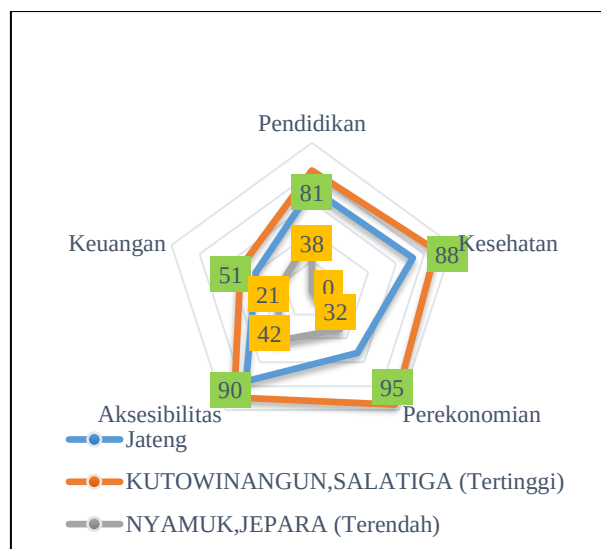


Gambar 1. Box plot Komponen IDD Desa dan kelurahan di Jawa Tengah

Dari gambar 1, dapat dilihat bahwa dimensi perekonomian memiliki nilai indeks yang paling menyebar dibandingkan dimensi lainnya. Hal tersebut mengindikasikan dimensi perekonomian merupakan dimensi yang menjadi pembeda kondisi daya saing antar wilayah.

Sedangkan dimensi keuangan dan kelembagaan serta dimensi kesehatan menunjukkan distribusi menceng kanan. Hal ini menandakan bahwa dimensi tersebut cenderung terkonsentrasi pada nilai rendah.

Dilihat dari *range*-nya, nilai Indeks Daya Saing Desa/kelurahan (IDD) berkisar 26,71 (Desa Nyamuk di Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara) hingga 81,06 (Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga). Untuk melihat perbandingan setiap dimensi, penulis menggunakan *spider chart* antara karakteristik daya saing Desa Nyamuk dengan Kelurahan Kotowinangun sebagai berikut.



Gambar 2. Spider Chart Rata-rata Komponen IDD Desa dan Kelurahan di Jawa Tengah

Dari gambar 2 dapat dilihat perbandingan Desa Nyamuk yang terletak di sebagai desa/kelurahan dengan IDD terendah di Jawa Tengah terhadap Kelurahan Kutowinangun yang merupakan desa/kelurahan dengan IDD tertinggi. Dari 5 dimensi yang ada, terlihat bahwa dimensi kesehatan dan perekonomian memiliki gap yang paling besar.

Untuk melihat lebih detail mengenai perbandingan karakteristik kesehatan antara kedua wilayah tersebut, berikut dijabarkan indikator kesehatan Desa Nyamuk dan Kelurahan Kutowinangun :

Tabel 1. Perbandingan Indikator Dimensi Kesehatan

Wilayah	Jarak Dokter	Jarak RS	Jarak Apotek	Jarak RS Bersalin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kutowinangun	0,00	0,00	0,00	3,00
Nyamuk	98,00	98,00	98,00	98,00

Berdasarkan Buku Pedoman Pencacahan PODES 2014 (BPS, 2014), apabila jarak tertulis 98 maka jarak di lapangan lebih dari 98 KM. Sedangkan apabila jarak tertulis 0 artinya pada desa atau kelurahan tersebut sudah memiliki fasilitas kesehatan. Dilihat dari tabel 1, jarak ke tempat praktik dokter dari Desa Nyamuk mencapai 98 KM. Artinya warga Desa Nyamuk harus menempuh lebih dari 98 KM untuk mendapatkan penanganan

dari dokter. Sementara itu di Kelurahan Kotawinangun sudah terdapat praktik dokter di wilayahnya.

Kasus yang sama seperti variabel jarak ke tempat praktik dokter juga terjadi pada variabel jarak ke Rumah Sakit, jarak ke Apotek serta jarak ke Rumah Sakit Bersalin. Warga Desa Nyamuk harus menempuh lebih dari 98 KM untuk menjangkau fasilitas Rumah Sakit, Apotek. Sedangkan di Kelurahan Kutowinangun sudah terdapat fasilitas seperti Rumah Sakit dan Apotek di wilayahnya. Rumah Sakit Bersalin juga hanya berjarak 3 Km dari wilayah tersebut.

Temuan di atas menjelaskan mengapa terjadi kesenjangan daya saing yang cukup besar antara Desa Nyamuk dan Kelurahan Kutowinangun. Sulitnya akses kesehatan di Desa Nyamuk disebabkan letaknya yang berada di wilayah Kepulauan Karimunjawa. Masih minimnya ketersediaan maupun akses kesehatan di kepulauan ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah harus menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai khususnya untuk wilayah Kepulauan Karimunjawa karena selain jaraknya yang cukup jauh dengan Fasilitas Kesehatan, tantangan medan berupa laut yang keadaannya tidak menentu menjadi tantangan tersendiri bagi warga karimunjawa dibanding wilayah lain di Jawa Tengah.

Tabel 2. Perbandingan Indikator Dimensi Perekonomian

Wilayah	Jarak Pertokoan	Jarak Pasar	Jumlah Toko	Jumlah Warung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kuto winangun	0,00	0,00	425	392
Nyamuk	38,00	38,00	38	4

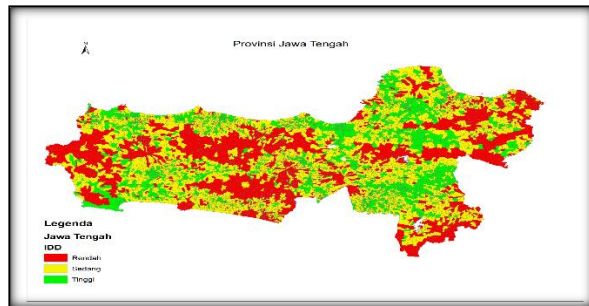
Dilihat dari tabel 2, jarak dari Desa Nyamuk ke pasar ataupun kelompok pertokoan masing-masing 32 dan 38 KM. Sedangkan jarak Kelurahan Kutowinangun ke kelompok pertokoan maupun pasar permanen/semipermanen 0 KM, artinya di

Kelurahan Kotawinangun tersedia fasilitas-fasilitas tersebut. Akses ke pertokoan dan pasar permanen/semipermanen merupakan salah satu aspek yang penting dalam penggerak ekonomi daerah tersebut. Selain itu, jumlah toko/warung kelontong dan jumlah warung/kedai makanan minuman yang dimiliki Desa Nyamuk terhadap Kelurahan Kutowinangun juga memiliki kesenjangan yang cukup besar.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing perekonomian Desa Nyamuk adalah pengembangan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan daya tarik pariwisata karimunjawa. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat memberikan keuntungan ekonomis pada warga contohnya rumah warga dapat dijadikan *homestay* untuk wisatawan (Elida, 2005).

Selain Desa Nyamuk, Desa Parang di yang merupakan desa induk dari Desa Nyamuk serta Desa Kemujan di Kecamatan Karimunjawa juga memiliki daya saing yang rendah. Desa Parang dan Desa Kemujan berturut-turut memiliki IDD 30,84 dan 42,20 poin atau menjadi yang terendah di Jawa Tengah setelah Desa Nyamuk. Fakta ini menunjukkan bahwa secara umum daya saing desa di wilayah Karimunjawa perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Selanjutnya disajikan hasil penghitungan IDD yang telah diklasifikasikan kedalam 3 kategori. Lebih jelasnya dapat dilihat pada peta tematik berikut :

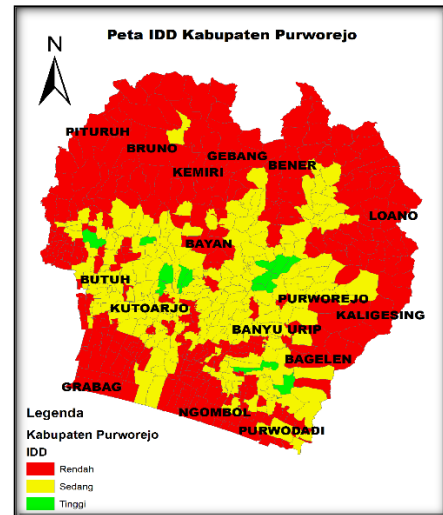


Gambar 3. Tematik IDD Desa dan kelurahan di Provinsi Jawa Tengah

Nilai IDD masing-masing desa dan kelurahan digunakan untuk melihat posisi relatif daya saing terhadap wilayah lain. Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa terdapat kecenderungan desa dan kelurahan yang terletak di wilayah dataran tinggi seperti bagian selatan Kabupaten Pekalongan, Batang, Wonogiri dan Wonosobo, bagian barat daya Kabupaten Brebes, bagian barat Kabupaten Cilacap, serta bagian utara Kabupaten Banjarnegara dan Purworejo memiliki daya saing yang relatif rendah. Sementara itu, desa dan kelurahan yang berada di pesisir utara yang membentang dari Kabupaten Brebes hingga Kota Semarang dan Jepara serta bagian pesisir selatan kabupaten Cilacap memiliki daya saing sedang hingga tinggi.

Untuk menentukan wilayah konsentrasi desa dan kelurahan berdaya saing rendah, penulis menggunakan persentase desa dan kelurahan dengan IDD kategori rendah untuk masing-masing kabupaten/kota. Dari persentase tersebut, Kabupaten Purworejo, Rembang, Wonogiri, Blora dan Wonosobo merupakan daerah konsentrasi desa/kelurahan dengan daya saing rendah.

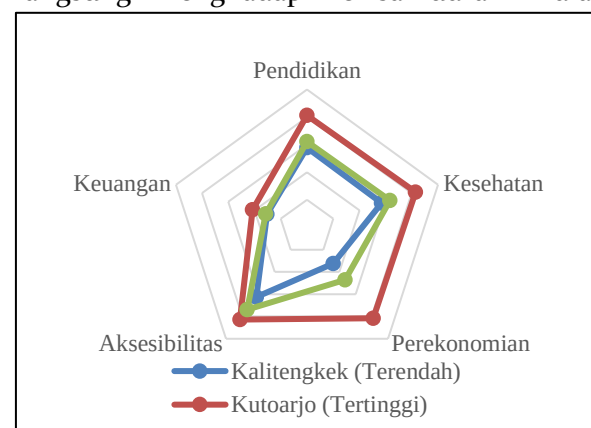
Untuk melihat lebih jauh mengenai kondisi beberapa wilayah tersebut, penulis menggunakan peta tematik dari masing-masing kabupaten tersebut. Peta tematik kali ini sudah menggunakan data IDD yang dikelompokkan sebagai acuan.



Gambar 4. Peta Tematik IDD di Kabupaten Purworejo

Kabupaten Purworejo memiliki 494 desa dan kelurahan dengan 55 persen diantaranya desa berdaya saing rendah. Hal ini sejalan dengan nilai rata-rata IDD Kabupaten Purworejo sebesar 55,57 poin atau jadi yang paling rendah diantara kabupaten lain di Jawa Tengah.

Terdapat pola pengelompokan desa dengan daya saing rendah di Purworejo. Letak desa tersebut sebagian besar berada di daerah pinggiran sebelah utara yang merupakan daerah dataran tinggi dan sebagian lagi daerah pesisir selatan yang langsung menghadap ke samudra hindia.



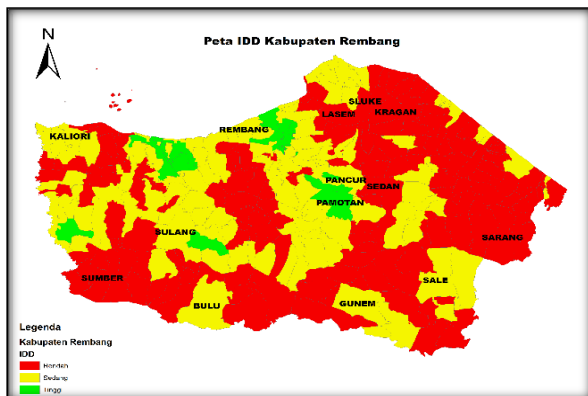
Gambar 5. Dekomposisi komponen IDD di Kabupaten Purworejo

Gambar 5 menunjukkan perbandingan nilai IDD terendah dan tertinggi serta IDD

rata-rata setiap dimensi di Kabupaten Purworejo. Dari gambar dapat dilihat bahwa perekonomian dan kesehatan memiliki gap paling besar di Purworejo. Sementara itu dimensi keuangan memiliki nilai indeks yang relatif rendah di wilayah ini.

Informasi yang diberikan gambar 3 menunjukkan persebaran desa daya saing rendah di Purworejo terkonsentrasi pada wilayah pegunungan dan pesisir yang jauh dari pusat pemerintahan. Masalah yang seringkali dialami wilayah seperti ini berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas. Hal tersebut dapat menimbulkan kesenjangan pada dimensi perekonomian dan kesehatan yang sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur maupun aksesibilitas.

Pemberdayaan Klaster Ekonomi dan forum kemitraan (Bambang & Suprpto, 2014) bisa menjadi salah satu alternatif solusi pengembangan desa. Wilayah pegunungan dan pesisir memiliki alam memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan melalui kemitraan antar desa.

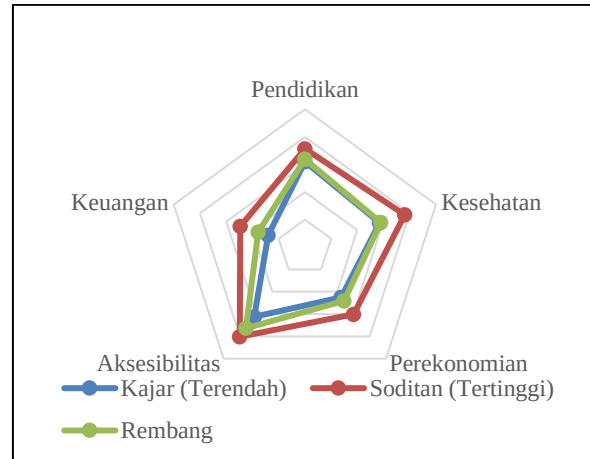


Gambar 6. Peta Tematik IDD di Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang memiliki 294 desa dan kelurahan dengan rata-rata IDD 55,65 poin. Rembang memiliki sekitar 53 persen desa berdaya saing rendah. Desa tersebut banyak tersebar dari ujung timur seperti Kecamatan Kragan, Barang, dan Sale yang berbatasan dengan Kabupaten Tuban, hingga

pinggiran selatan seperti Kecamatan Bulu dan Sumber. Konsentrasi desa dengan daya saing rendah di Kabupaten Rembang lebih menyebar dibandingkan yang terjadi di Kabupaten Purworejo.

Namun sebagian besar desa disekitar pusat pemerintahan cenderung memiliki daya saing sedang hingga tinggi. Fakta ini sudah menjadi masalah klasik di Indonesia.



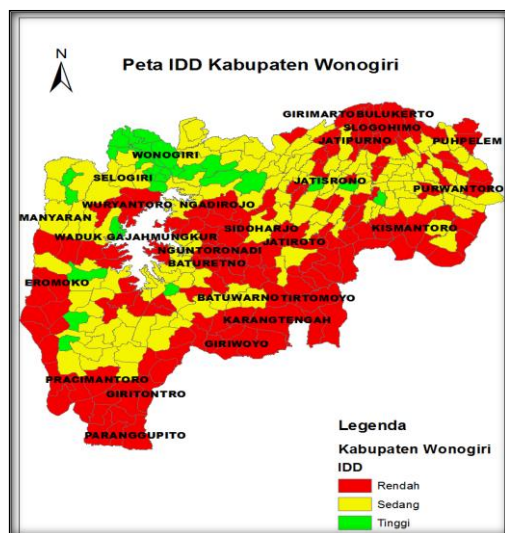
Gambar 7. Spider Chart Indeks Dimensi Kabupaten Rembang

Gambar 7 menunjukkan perbandingan komponen daya saing tertinggi yaitu Desa Soditan (Kecamatan Lasem), terendah yaitu Desa Kajar (Kecamatan Gunem), serta daya saing desa dan kelurahan secara umum di Kabupaten Rembang. Dilihat dari gambar tersebut, dimensi keuangan dan kesehatan merupakan komponen daya saing dengan gap terbesar antara kedua desa tersebut.

Sementara itu, dimensi perekonomian dan kesehatan menunjukkan ketimpangan pembangunan di Rembang secara umum. Kecamatan Lasem sebagai sentra batik tulis di Kabupaten Rembang dengan menjadikan salah satu faktor pendorong kemajuan daya saing perekonomian di Desa Soditan. Sedangkan daya saing perekonomian lebih banyak dipengaruhi perhatian pemerintah dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pengembangan Kawasan UMKM

industri kreatif seperti batik tulis di Kecamatan Lasem untuk mendorong daya saing ekonomi. Sedangkan peningkatan infrastruktur kesehatan dan akses menuju fasilitas kesehatan menjadi hal yang wajib dilakukan pemerintah untuk mendorong daya saing kesehatan di wilayah ini.



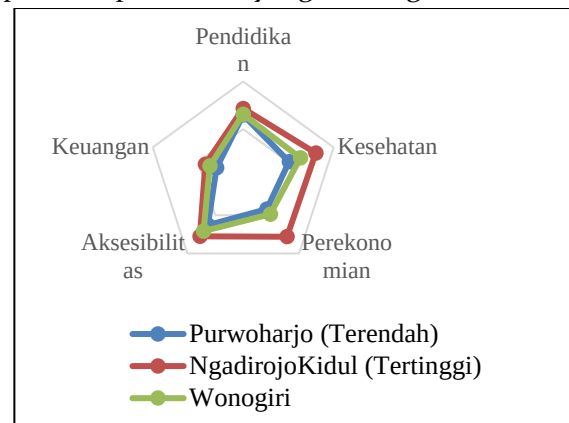
Gambar 8. Peta tematik IDD di Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri memiliki 294 desa dan kelurahan dengan sekitar 43 persen diantaranya memiliki daya saing rendah. Hal tersebut sejalan dengan rata-rata IDD di Kabupaten Wonogiri sebesar 57,04 poin.

Secara umum desa dan kelurahan dengan daya saing rendah lebih banyak tersebar di bagian selatan seperti Kecamatan Pracimantoro, Parangupito, Girintotro, Girowoyo, dan Karangtengah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Pacitan serta Samudra Hindia. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di desa dan kelurahan pinggiran selatan belum optimal dan harus menjadi salah satu fokus bagi pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri.

Peningkatan *Local Economic Development (LED)* melalui klaster ekonomi dan forum kemitraan antar desa dapat menjadi solusi peningkatan daya saing desa

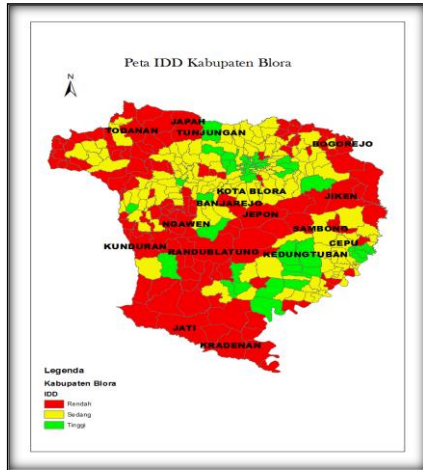
(Bambang & Suprpto, 2014). Klaster ekonomi bisa berfokus pada pengembangan pariwisata yang menjadi potensi pada wilayah ini. Sementara kemitraan antar desa dapat dilakukan dengan kerjasama promosi dan peningkatan akses pariwisata. Dengan kerjasama antar desa yang lebih baik, penggunaan dana desa dapat dikembangkan untuk menunjang pengembangan dan promosi pariwisata yang terintegrasi.



Gambar 9. Dekomposisi komponen IDD di Kabupaten Wonogiri

Gambar 8 menunjukkan perbandingan komponen daya saing terendah yaitu Desa Purwoharjo (Kecamatan Karang Tengah), tertinggi yaitu Desa Ngadirojo Kidul (Kecamatan Ngadirojo), serta kondisi daya saing desa dan kelurahan secara umum di Kabupaten Wonogiri. Dilihat dari *gap* per dimensi antara desa tertinggi dengan terendah, masalah daya saing desa dan kelurahan di Kabupaten Wonogiri terletak pada dimensi kesehatan dan perekonomian. Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah ketersediaan fasilitas perekonomian dan kesehatan di Kabupaten Wonogiri harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah setempat. Selain itu, dimensi keuangan dan kelembagaan juga harus diperbaiki kaitannya dengan peran pemerintah setempat dalam menciptakan struktur kelembagaan serta peningkatan kemandirian desa dan kelurahan.

Upaya pemberdayaan desa wisata tidak hanya meningkatkan daya saing desa dari sisi perekonomian, melainkan juga peningkatan daya saing keuangan dan kelembagaan melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Pengelolaan pariwisata yang baik dapat menjadi sumber PAD baru dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan desa.

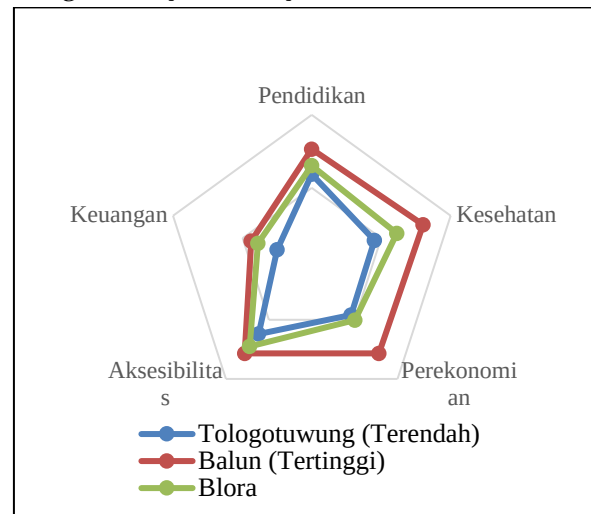


Gambar 10. Peta tematik IDD di Kabupaten Blora

Kabupaten Blora memiliki 295 desa dan kelurahan dengan 38 persennya merupakan desa dengan daya saing rendah. Hal ini sejalan dengan hasil penghitungan IDD dimana Kabupaten Blora memiliki nilai rata-rata terendah ke-empat di Jawa Tengah dengan nilai 57,55. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan berbasis desa di Kabupaten Blora harus menjadi salah satu fokus pembangunan bagi pemerintah daerah setempat.

Dilihat dari gambar 10, persebaran desa menurut posisi daya saing relatif di Kabupaten Blora, terdapat suatu pola sistematis yang harus dicermati Pemerintah Daerah setempat. Desa dan kelurahan dengan daya saing sedang hingga tinggi di kabupaten ini lebih banyak terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Blora, dan wilayah sekitarnya seperti Kecamatan Tunjungan, Ngawen, Banjarejo dan Jepun yang merupakan wilayah yang berada di sekitar

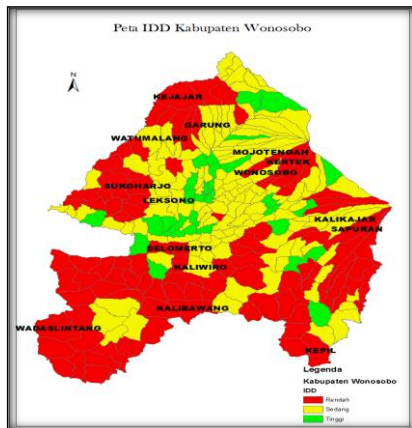
pusat pemerintahan Kabupaten Blora. Selain itu, desa dan kelurahan dengan daya saing relatif sedang hingga tinggi juga banyak terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Cepu yang merupakan kawasan pengilangan minyak dan wilayah sekitarnya seperti Kecamatan Sambong dan Kedungtuban. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pola pembangunan yang tidak seimbang antara wilayah di sekitar pusat pemerintahan dan pusat kilang minyak di Kabupaten Blora dengan wilayah lainnya.



Gambar 11. Dekomposisi komponen IDD di Kabupaten Blora

Gambar 11 menunjukkan perbandingan komponen daya saing terendah yaitu Desa Tologotuwung (Kecamatan Randublatung) dibandingkan tertinggi yaitu Kelurahan Balun (Kecamatan Cepu) serta kondisi daya saing desa dan kelurahan secara umum di Kabupaten Blora. Terlihat bahwa dimensi keuangan dan kelembagaan, kesehatan dan perekonomian merupakan dimensi dengan gap yang paling besar. Hal tersebut hampir identik dengan kasus kabupaten lain. Dari gap ketiga dimensi, gap pada dimensi perekonomian dan kesehatan merupakan yang paling besar sehingga peningkatan dimensi tersebut harus menjadi perhatian utama di samping peningkatan dimensi keuangan dan kelembagaan.

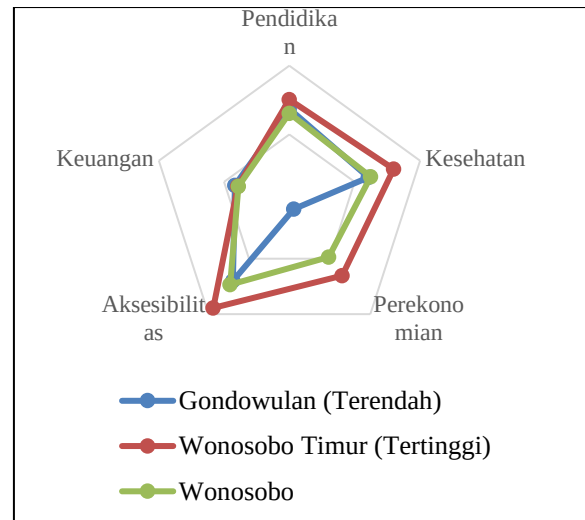
Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mendorong pemerataan daya saing desa dan kelurahan di Kabupaten Blera adalah pengoptimalan CSR. Menurut Achlif Nugroho, pengelolaan CSR di Blera masih memprihatinkan dan kurang maksimal (Sampurno, 2015). Oleh karena itu, CSR dapat digunakan sebagai instrument pemerataan daya saing desa dan kelurahan.



Gambar 12. Peta tematik IDD di Kabupaten Wonosobo

Dari 265 desa dan kelurahan di Kabupaten Wonosobo terdapat sekitar 37 persen desa dengan daya saing rendah. Dilihat dari persebarannya, desa dengan daya saing rendah lebih banyak terdapat di wilayah bagian selatan Kabupaten Wonosobo seperti wilayah Kecamatan Wadaslintang, Kalibawang dan Kaliwiro.

Desa dan kelurahan dengan daya saing sedang dan tinggi banyak tersebar di Kecamatan Wonosobo, Leksono dan Mojotengah yang merupakan daerah di sekitar pusat pemerintahan Kabupaten Wonosobo. Selain itu, desa dan kelurahan dengan daya saing sedang hingga tinggi juga banyak terdapat di bagian utara seperti Kecamatan Watumalang dan Garung yang memiliki topologi wilayah yang hampir mirip dengan bagian selatan yaitu dataran tinggi.



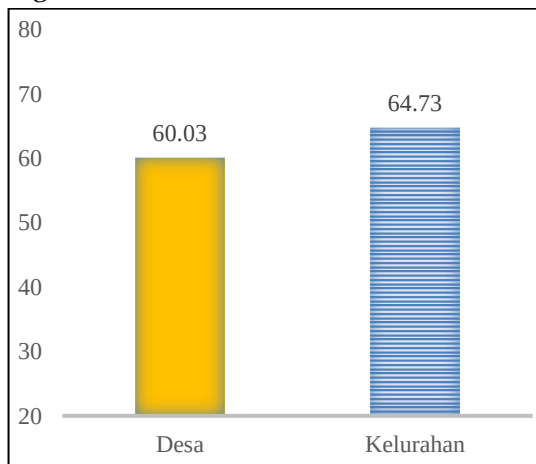
Gambar 13. Dekomposisi komponen IDD di Kabupaten Wonosobo

Gambar 12 menunjukkan perbandingan dekomposisi komponen daya saing terendah yaitu Desa Gondowulan (Kecamatan Kepar), tertinggi yaitu Kelurahan Wonosobo Timur (Kecamatan Wonosobo), dan kondisi daya saing desa dan kelurahan secara umum di Kabupaten Wonosobo. Dilihat dari gambar tersebut, dimensi perekonomian memiliki gap yang paling besar.

Di bagian utara Kabupaten Wonosobo sudah ada pengoptimalan wisata alam dan budaya seperti dieng, selain itu juga terdapat pemanfaatan keunggulan pertanian seperti adanya sentra produksi kentang. Dengan topologi wilayah yang relatif sama, bagian selatan seharusnya memiliki potensi yang dapat dioptimalkan juga. Namun pemanfaatan potensi objek wisata seperti Gunung Indra, Gunung Mentosari, Waduk Wadaslintang dan Kalianget Somogede belum dimanfaatkan dengan baik. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah setempat terutama untuk menanggulangi ketimpangan kondisi perekonomian desa dan kelurahan antara bagian selatan dan utara.

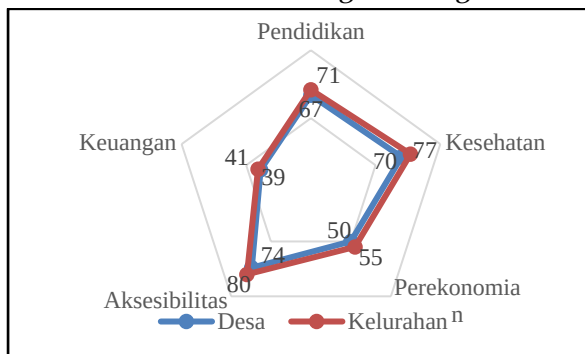
Perbandingan Daya Saing Desa dan Kelurahan

Dalam penelitian ini, penulis juga tertarik untuk mengkaji bagaimana perbandingan daya saing antara desa dan kelurahan sebagai wilayah dengan status pemerintahan berbeda. Gambar 14 menunjukkan perbandingan nilai rata-rata nilai indeks komposit daya saing antara desa dengan kelurahan.



Gambar 14. IDD menurut status pemerintahan

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa kelurahan mempunyai indeks 64,73 sehingga posisi daya saingnya lebih tinggi dibandingkan desa yang memiliki indeks 60,03. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, kelurahan memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan dengan desa.



Gambar 15. Dekomposisi Komponen IDD Menurut Status Pemerintahan di Jawa Tengah

Untuk melihat lebih jauh penyebab perbedaan kondisi daya saing antara desa dan kelurahan secara umum, penulis melihat nilai indeks masing-masing dimensi. Dilihat dari dekomposisi masing-masing indeks dimensi, terlihat bahwa kelurahan lebih baik di semua

dimensi daya saing. Dimensi pendidikan, kesehatan serta aksesibilitas fisik dan informasi merupakan dimensi dengan selisih nilai terbesar, hal ini mengindikasikan perbedaan kondisi fasilitas infrastruktur kesehatan serta perbedaan kemudahan akses menjadi salah satu faktor kunci perbedaan kondisi daya saing desa dan kelurahan.

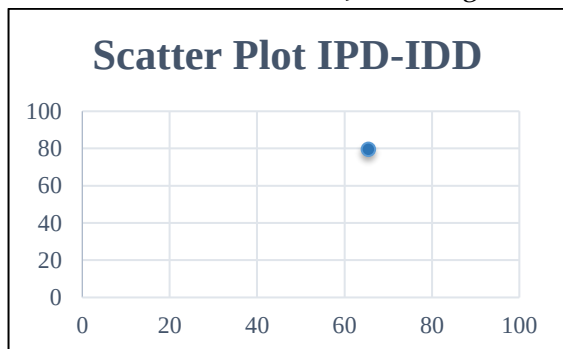
Dari fakta yang telah diterangkan, dapat dikatakan bahwa kondisi ini sesuai dengan karakteristik kelurahan yang biasanya terdapat di wilayah perkotaan dan cenderung memiliki daya saing lebih baik dibandingkan dengan perdesaan. Dengan demikian upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan desa sudah cukup relevan dengan kondisi yang ada. Pembangunan desa dan perdesaan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daya saing desa-kota di Jawa Tengah.

Hubungan dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD)

Langkah terakhir dalam *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide* (OECD, 2008) adalah pengecekan hubungan indikator yang terbentuk dengan indikator yang sudah ada. Dalam hal ini penulis melakukan pengujian korelasi antara IDD dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD) (BPS & BAPPENAS, 2015). Konsep pembangunan dan daya saing sangat berkaitan erat (Abdullah, Alisjahbana, Effendi, & Boediono, 2002). Sehingga pengujian IDD dengan IPD menjadi relevan.

Pada akhir tahun 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bekerja sama dengan BPS memublikasikan Indeks Pembangunan Desa (IPD) tahun 2014. Indeks ini dibangun untuk melihat perkembangan desa menggunakan 42 indikator tunggal yang terbagi ke dalam lima dimensi, yaitu pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, serta penyelenggaraan pemerintah.

IPD 2014 dihitung dan dipublikasikan dengan unit analisis desa di seluruh Indonesia. Sementara itu Indeks Daya Saing Desa dalam penelitian ini dihitung dengan unit analisis desa dan kelurahan di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, untuk melihat pola hubungan antara kedua indeks tersebut, digunakan nilai indeks desa untuk Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 16. Scatter plot antara IPD dengan IDD

Dari scatter plot pada gambar terdapat indikasi pola hubungan yang positif antara Indeks Pembangunan Desa dengan Indeks Daya Saing Desa yang terbentuk. Untuk menguji lebih lanjut pola hubungan keduanya, maka digunakan analisis korelasi.

Tabel 3. Korelasi IDD dengan IPD di Jawa Tengah

Korelasi		
		IPD2014
IDD	Pearson Correlation	,673**
	Sig. (2-tailed)	,000
**.Korelasi signifikan untuk alfa 0.05.		

Dari tabel korelasi di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Daya Saing Desa memiliki korelasi positif dan signifikan indikator tingkat desa lainnya. Hal ini membuktikan bahwa IDD yang terbentuk cukup relevan untuk menjelaskan fenomena terkait daya saing desa.

Dilihat dari jumlah variabel yang digunakan, IDD yang disusun dari 27 indikator terbukti lebih efisien dibandingkan IPD (42 Indikator) dan Indeks Desa

Membangun (52 indikator) (Kementerian Desa, 2015). Di samping berbagai kekurangan yang tentunya terdapat dalam penyusunan IDD, efisiensi penggunaan indikator penyusun tentunya menjadi kelebihan tersendiri.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari penjelasan dalam bab sebelumnya, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yaitu (1) Wilayah dengan IDD terendah berturut-turut Desa Nyamuk, Parang dan Kemujan semuanya terdapat di wilayah Karimunjawa. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah karimunjawa perlu diberikan perhatian khusus, (2) Nilai indeks komposit yang terbentuk menunjukkan bahwa secara umum kelurahan memiliki posisi daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan dengan desa. Hal ini dibuktikan melalui hasil pengujian beda rata-rata yang dilakukan, (3) Kelompok desa dan kelurahan dengan daya saing rendah banyak terkonsentrasi di wilayah dataran tinggi seperti kasus yang terjadi di Purworejo, Wonosobo, dan Wonogiri. Hal tersebut secara umum diakibatkan rendahnya daya saing di bidang perekonomian dan kesehatan di wilayah bersangkutan.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil untuk beberapa pihak, antara lain :

1. Penyedia Data
Perlu adanya perbaikan kualitas dan kuantitas data kewilayahan terutama yang mencakup hingga desa dan kelurahan. Hal ini berkaitan dengan urgensi pembangunan desa yang menjadi salah satu fokus pembangunan nasional.
2. Pemerintah Daerah
 - a. Fokus kebijakan dalam rangka meningkatkan kemampuan desa dalam

mencapai tujuan pembangunan dapat dilakukan dengan peningkatan ketersediaan sarana kesehatan terutama di daerah dataran tinggi yang berdaya saing rendah.

- b. Salah satu upaya peningkatan daya saing desa dan kelurahan dapat dilakukan melalui sinergi kebijakan Local Economic Development (LED) dan pembangunan perdesaan. Bambang dan Suprpto (Bambang & Suprpto, 2014) mengemukakan bahwa sebagai upaya peningkatan daya saing desa, perlu dibentuk rekayasa kelembagaan yang sejalan dengan dua strategi pokok kebijakan Local Economic Development, yaitu klaster ekonomi dan forum kemitraan. Klaster ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dimensi perekonomian. Sedangkan forum kemitraan berfungsi untuk meningkatkan struktur keuangan dan kelembagaan desa dan kelurahan yang ada.
3. Rekomendasi Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Dalam pembentukan indeks daya saing desa dan kelurahan, perlu dilakukan pembentukan baseline supaya indeks daya saing yang terbentuk dapat dibandingkan antar waktu.
 - b. Peneliti selanjutnya dapat melakukan kajian pembentukan indeks komposit daya saing desa dan kelurahan menggunakan metode analisis lain yang dapat mengakomodir data-data yang bersifat ordinal maupun nominal dari kegiatan PODES.

Implikasi dan Keterbatasan

Salah satu kekurangan dalam penyusunan IDD adalah penggunaan Analisis Faktor. Analisis jenis ini tidak mengakomodir penggunaan data berjenis ordinal dan nominal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P., Alisjahbana, A., Effendi, N., & Boediono. (2002). *Daya Saing Daerah : Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Bambang, & Suprpto. (2014). Sinergitas Kebijakan Local Economic Development dan Pembangunan Pedesaan Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Desa. *Seminar Nasional & Call For Pappers (SCA-4)* (pp. 1015-1027). Banyumas: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSOED.
- Booyesen, F. (2002, Aug). An Overview and Evaluation of Composite Indices of Development. *Social Indicators Research*, 115.
- BPS. (2012). *Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Wilayah Indonesia*. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- BPS. (2014). *Buku 2 : Pedoman Pencacahan PODES 2014*. Jakarta: BPS.
- BPS, & BAPPENAS. (2015). *Indeks Pembangunan Desa 2014*. Jakarta: BPS & BAPPENAS.
- Carney, B., & Kaiser, H. (1977). A Study of A Measure of Sampling Adequacy For Factor-Analytic Correlation Matrices. *The Journal of Multivariate Behavioral Research*, 43-47.
- Elida, F. (2005). *POLA PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG BERBASIS MASYARAKAT DI KEPULAUAN KARIMUNJAWA*. Semarang: Universitas Diponegoro [Thesis].
- Faradis, R. (2015). *Klasifikasi Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indeks Komposit Pembangunan Infrastruktur [Skripsi]*. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.
- Kementerian Desa, P. (2015). *Indeks Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, PDTT.
- Mc Nicoll, I. H., Kelly, U., Marsh, R., & Mc Lay, D. (2002). *Defining and Identifying The Knowledge Economy in Scotland*. Scotland: University of Strathclyde.

- OECD. (2008). *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*. Ispra: OECD.
- Pusponegoro, N., & Purwanti, D. (2016). Perbedaan Capaian Pendidikan Anak Berdasarkan Perubahan Pengeluaran Rumah Tangga di Indonesia Tahun 2011-2013. *Prosiding SEMASTAT* (pp. 214-222). Padang: UNP.
- Sampurno, A. (2015, November 28). *Suara Banyuurip.com*. Retrieved from Suara Banyuurip.com: <https://www.suarabanyuurip.com/index.php?/kabar/baca/csr-jadi-perhatian-serius-dprd-blora>
- SESNEG. (2014). *UU No 6 Tahun 2014*. Jakarta: SESNEG.
- Sharma, S. (1996). *Applied Multivariate Techniques*. Canada: John Wiley & Son, Inc.
- Tobias, S., & Carson, J. E. (1969). *Brief Report : Barlett's Test of Sphericity and Chance Findings in Factor Analysis*. Multivariate Behavioral Research.
- Todaro, M., & Smith, S. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. (H. M. P. A., Trans.) Jakarta: Erlangga.
- United Kingdom-Departement of Trade and Industry . (1998). *Regional Competitiveness Indicators*. London: UK-DTI.
- World Economic Forum. (2015). *The Global Competitiveness Report 2015-2016*. Geneva: World Economic Forum.